

DAMPAK ALIH FUNGSI PENYEMPITAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP MASYARAKAT DESA PANTI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

Henryco Orbanus Akbar¹
Universitas PGRI Argopuro Jember
henrycoakbar22@gmail.com

Catur Yuniyanto²
Universitas PGRI Argopuro Jember
ycaturyuniyanto@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus alih fungsi lahan pertanian didasari oleh perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk. Permasalahan ini terjadi di Desa Panti yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Jember. Penyempitan lahan pertanian memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif, yang ditinjau dari berbagai faktor. Dampak negatif dan positif dapat dilihat dari segi ekonomi, fasilitas, dan lingkungan. Diantaranya adalah: banyak petani yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya daerah resapan air, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan perlunya lebih banyak ketersediaan lahan pangan yang ada. Namun, pada kenyataannya, laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lahan pangan. Oleh karena itu, perlu adanya respon yang cepat dari pemerintah desa untuk menanggapi permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang langsung diperoleh dari pemerintah Desa Panti. Teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan analisis Miles, Huberman, dan Saldana melalui beberapa tahapan diantaranya; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Panti dapat memberikan solusi dan evaluasi bagi desa.

Kata kunci: lahan, penyempitan, petani, desa, pertumbuhan penduduk

Abstract

The rise of cases of agricultural land conversion is based on the development of the region, population growth and population distribution. This problem occurs in Panti Village, which is located in the southwestern part of Jember Regency. The narrowing of agricultural land has several impacts, both positive and negative, which are viewed from various factors. Negative and positive impacts can be seen in terms of the economy, facilities, and the environment. Among them are: many farmers lost their jobs, reduced water catchment areas, and high population growth rates causing the need for more availability of existing food land. However, in reality, the population growth rate is faster than the availability of food land. Therefore, it is necessary for the village government to

respond quickly to the existing problems. This research uses qualitative methods. The data source used is primary data directly obtained from the Panti Village government. Collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. Checking data validity using data triangulation techniques. Data analysis used Miles, Huberman, and Saldana Analysis through several stages including; data collection, data condensing, data presentation, and data verification. The results of this research are expected that the Panti Village Government can provide solutions and evaluations for the village.

Keywords: *land, narrowing, farmer, village, population growth*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu faktor konsekuensi dari perkembangan wilayah dan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Fahri Zulfikar (2020) Indonesia menempati peringkat keempat sebagai Negara yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 273.523615. Seperti yang kita ketahui bahwa, persebaran penduduk di Indonesia pun tidak merata dan hanya berpusat di Jawa. Menurut Febriana Sulistya Dewi (2023) mengatakan bahwa : Berdasarkan data dari *World Economic Forum (WEF)*, bahwa : “Pulau Jawa menjadi pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia sebesar 1.015 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021” Dengan adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia, dibutuhkan perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah suatu daerah ditunjukkan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur dan industri yang ada. Adanya fenomena ini pertambahan pembangunan infrastruktur yang semakin bertambah pesat, tentunya akan berdampak pada lahan hijau terutama pada lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk.

Permasalahan alih fungsi lahan juga terjadi di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Jember. Desa Panti adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Panti dan terletak di bagian utara Kabupaten Jember. Desa tersebut dipilih sebagai tempat penelitian penulis karena terdampak dari urbanisasi yang menjadikan desa tersebut menjadi padat penduduk, dan berkurangnya mayoritas lahan pertanian yang dijadikan sebagai perumahan pemukiman penduduk. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh dari pihak Desa Panti bahwasannya luas lahan pertanian yang ada disana hanya tersisa sebesar 53,06 hektar dari jumlah keseluruhan lahan sebesar 6500 hektar. Penyempitan lahan tersebut di alih fungsikan menjadi perumahan pemukiman penduduk, dengan salah satu contohnya yang ada di dusun krajan selatan desa Panti. Hal tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi warga desa panti, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak negatif dari penyempitan lahan ini diantaranya banyak warga yang mengeluhkan kehilangan pekerjaannya terutama para buruh tani dan petani karena alih fungsi lahan menjadi perumahan pemukiman penduduk. Menurut data yang diperoleh dari pihak desa sekitar, mayoritas pekerjaan warga desa Panti adalah bertani dengan jumlah sebesar 1175 orang. Sedangkan dampak positif dari alih

fungsi penyempitan lahan adalah ketersediaan listrik dan akses jalan yang mudah dan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru selain di bidang pertanian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana dampak dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian di desa Panti dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi alih fungsi penyempitan lahan pertanian yang ada di desa Panti.

PEMBAHASAN

Desa Panti merupakan kawasan Dataran Tinggi dengan mayoritas persawahan, perkebunan, dan permukiman penduduk. Desa Panti terletak di Kelurahan Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Desa Panti terletak di sebelah barat daya Kabupaten Jember. Desa Panti berbatasan dengan beberapa Desa yang ada di Kecamatan Panti, diantaranya Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemuningsari Lor dan Desa Pakis, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serut, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suci, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Glagahwero. Desa Panti terdiri dari 7 Dusun diantaranya Dusun Krajan Selatan, Dusun Krajan, Dusun Darungan, Dusun Gebang Langkap, Dusun Gebang, Dusun Prapah, Dusun Wonolangu. Masyarakat Desa Panti mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan bercocok tanam. Masyarakat memanfaatkan lahan yang mereka punya untuk dikelola sehingga menghasilkan kebutuhan pangan untuk mereka sehari-hari salah satunya, beras, jagung, cabai, kentang, wortel, bawang, dan lain-lain.

Tanah yang ada di desa Panti merupakan tanah yang subur sehingga dijadikan lahan pertanian oleh warga dan dapat mencukupi kebutuhan pangan warga Desa Panti. Sumber air bersih yang ada di Desa Panti juga melimpah dan juga terdapat sumber mata air yang dibuat menjadi air mineral yang bermerek dan dijual di pasaran yaitu Air Mineral Ampo. Tetapi ada beberapa daerah yang mengalami sedikit kekurangan mata air terutama pada pengairan lahan pertanian. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat produksi hasil pangan masyarakat yaitu Dusun Karajan, dan Dusun Krajan Selatan. Warga yang tinggal di Desa Panti memang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, tetapi ada juga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, berwirausaha, beternak dan bekerja di pabrik.

Gambaran alih fungsi lahan pertanian saat ini merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi di masyarakat, salah satunya terjadi pada masyarakat Desa Panti. Salah satu dusun di Desa Panti yaitu terdapat di Dusun Krajan Selatan. Dusun Krajan Selatan ini pada awalnya memiliki lahan pertanian yang luas kini beralih fungsi menjadi lahan perumahan permukiman penduduk. Banyak petani yang menjual lahan pertanian dan rumah mereka kepada investor yang datang ke Desa Panti. Masyarakat yang menjual lahannya terhadap investor memiliki banyak pertimbangan dari berbagai faktor. Sehingga membuat mereka menjual lahan pertanian tersebut. Lahan pertanian tersebut pada awalnya menjadi sumber utama masyarakat yang ada di dusun tersebut sebagai mata pencahariannya sebagai buruh tani sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Panti mayoritas berkerja sebagai buruh tani pada lahan yang mereka punya. Tetapi, dengan adanya penyempitan lahan tersebut beberapa masyarakat ada yang merubah mata pencahariannya

Masyarakat Desa Panti beralih profesi sebagai : kuli bangunan, ada juga yang masih menjadi buruh tani akan tetapi lahan yang di kerjakannya dipindahkan ke lokasi lain dan ada juga yang kehilangan pekerjaannya dan sulit untuk mencari pekerjaan baru. Masyarakat yang terdampak dari hal tersebut berubah mata pencahariannya menjadi tukang atau kuli bangunan bahkan tidak sedikit warga Desa Panti yang pada akhirnya mengeluhkan kesulitan mencari pekerjaan. Sebelum terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, akses lingkungan ke Desa Panti di beberapa Dusun sedikit susah karena harus melewati jalan yang kecil dan dihimpit oleh persawahan dan perkebunan.

Serta lingkungan daerah sekitar Desa Panti yang masih sepi dan kurangnya penerangan jalan. Tetapi setelah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan berdampak dengan adanya akses jalan menjadi lebih mudah dan dekat untuk dilalui. Lingkungan Desa Panti yang terdampak dari adanya perumahan menjadi ramai dan membantu umkm serta perekonomian masyarakat sekitar karena terdapat transaksi jual beli. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi penulis memilih lingkungan Desa Panti sebagai tempat penelitian karena terdampak dampak positif dan dampak negatif dari adanya penyempitan lahan.

Kondisi demografis dari Desa Panti menurut data yang diperoleh penulis menjelaskan bahwa, jumlah penduduk Desa Panti sebanyak 10.483 jiwa. dengan jumlah rumah tangga 3.587 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk perempuan 5.333 jiwa, sedangkan penduduk laki – laki 5.150 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk keseluruhan, jumlah terbesar didominasi oleh Dusun Darungan dengan jumlah 2006 jiwa, dan jumlah terendah berada di Dusun Wonolangu dengan 1.373 jiwa masyarakat desa Panti mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan bercocok tanam. Jumlah masyarakat desa Panti yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 1175 orang. Akan tetapi, teridentifikasi ke dalam beberapa sektor industri dan lain- lain. tidak semua warga berprofesi menjadi buruh tani dan sebagian hanya berwirausaha, beternak, kuli bangunan dan bekerja di pabrik.

Beberapa dusun yang ada di Desa Panti yaitu Dusun Darungan dan Dusun Wonolangu sebelum terjadinya alih fungsi lahan akses mengalami kesulitan karena akses jalan yang kecil dan jalanan yang rusak dan dikelilingi oleh persawahan dan perkebunan. Akan tetapi setelah terjadinya alih fungsi lahan akses menuju jalan raya lebih dekat dan mudah di lalui. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis memilih Desa Panti sebagai tempat penelitian karena dengan adanya alih fungsi lahan di lingkungan tersebut memiliki dampak positif dan negatif

Adanya alih fungsi lahan pertanian ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor pembangunan sarana dan prasarana, faktor desakan pengembang, faktor tempat tinggal dan ekonomi. Adanya alih fungsi lahan pertanian di lingkungan Desa Panti juga memiliki beberapa dampak pada penduduk, dampak yang dialami yaitu dampak positif dan dampak negatif antara lain :

1. **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Segi Fasilitas**

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dimulai sejak tahun 2016 dibangunlah perumahan yang ada di salah satu dusun Desa Panti yaitu Dusun Krajan Selatan. Sebelum dibangunnya perumahan tersebut, pihak developer dan masyarakat desa Panti melakukan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Sebelum adanya alih fungsi lahan masyarakat mayoritas berprofesi sebagai buruh tani. Ketika developer menawarkan masyarakat untuk menjual lahannya dengan beberapa pertimbangan yang akhirnya masyarakat Desa Panti bersepakat menjual lahannya. Hal tersebut dikarenakan beberapa lahan warga sudah tidak bisa memproduksi lagi karena disebabkan oleh debit air yang kecil sehingga pengairan sawah terganggu, dan tidak dapat mengairi sawah dengan maksimal meskipun dekat dengan wilayah mata air yang mudah di dapat karena di daerah tersebut merupakan dari wilayah dataran tinggi, harga yang ditawarkan oleh developer lebih tinggi sehingga masyarakat sepakat untuk menjual beberapa bagian lahan pertanian yang dimilikinya.

Adanya pembangunan perumahan ini tentu dirasakan dampak negatif maupun dampak positifnya terutama dari segi fasilitas yang memuat sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat Desa Panti. Adapun dampak positif yang di timbulkan dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan dari segi fasilitas antara lain :

1) Akses jalan yang mudah. Dampak positif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan akses jalan menjadi mudah untuk dilalui. Sebelum adanya pembangunan perumahan, jalanan yang ada di Dusun Krajan Selatan yang ada di Desa Panti sedikit susah untuk dilalui karena diapit oleh persawahan dan perkebunan. Sejak adanya pembangunan perumahan ini, akses jalan menjadi mudah untuk dilalui dan menjadi dekat dengan jalan raya.

2) Tersedianya fasilitas tiang listrik dan masuknya aliran listrik untuk penerangan jalan. Dampak positif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan tersedianya fasilitas tiang listrik yang berguna sebagai penerangan jalan dan masuknya aliran listrik untuk mempermudah penerangan dan kegiatan warga desa Panti sehari-hari.

3) Tersedianya fasilitas UMKM yang mendukung kebutuhan warga desa Panti. Dampak positif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan tersedianya fasilitas UMKM yang mendukung kebutuhan warga desa Panti. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya toko dan bangunan yang menjual berbagai macam kebutuhan warga Desa Panti dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Hal tersebut juga memberikan suatu dampak dukungan untuk memajukan perekonomian warga Desa Panti dari adanya aktivitas jual beli dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga yang terdampak dari alih fungsi penyempitan lahan Desa Panti.

Adapun dampak negatif yang di timbulkan dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan dari segi fasilitas antara lain :

1) Belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA). Belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) oleh warga perumahan yang disediakan oleh developer. Hal ini menyebabkan warga perumahan yang membuang sampah sembarangan di daerah persawahan ataupun perkebunan yang ada di sekitar perumahan.

2) Hilangnya investasi pemerintah di bidang infrastruktur pengairan dan menjadi tidak optimal Dampak negatif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan hilangnya investasi pemerintah di bidang infrastruktur pengairan dan menjadi tidak optimal. Fasilitas dari sarana dan prasarana dalam hal pengairan dan irigasi sawah menjadi tidak optimal dikarenakan pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran irigasi untuk pengairan sawah. Sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak optimal karena berkurangnya sasaran lahan pertanian, melainkan pemukiman penduduk.

3) Berkurangnya Ekosistem Sawah Berkurangnya ekosistem sawah di antaranya disebabkan oleh pembangunan pemukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata. Ekosistem sawah yang berkurang karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman meliputi komponen biotik dan abiotik. Sebagai informasi, contoh komponen biotik sawah yaitu tumbuhan seperti padi dan jagung, serangga, burung, dan keong. Sementara itu, komponen abiotik sawah yaitu seperti cahaya matahari, suhu, air, angin, batu, dan kelembaban tanah.

Dapat disimpulkan bahwasannya penyempitan alih fungsi lahan menjadi perumahan yang ada di Dusun Krajan Selatan yang ada di Desa Panti memberikan dampak baik positif maupun negatif yang sangat di rasakan oleh warga sekitar. Pada dasarnya alih fungsi lahan merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan wilayah yang merespons pertumbuhan penduduk. Hal ini tampak dari alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pemukiman padat penduduk.

2. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Segi Ekonomi

Perekonomian Desa Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu desa dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB desa Panti berasal dari sektor pertanian dan pertumbuhan para pelaku usaha kecil mikro yang menunjang laju perekonomian di masyarakat Desa Panti.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Panti pada awalnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dilihat dari perubahan dan pola hidup masyarakat terutama kemajuan kecukupan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), kebutuhan tambahan (kendaraan bermotor dan HP) rata-rata tiap rumah tangga sudah memiliki. Tetapi mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 secara mayoritas masyarakat terdampak ekonomi yang tidak stabil akibat dari Pandemi COVID 19 yang tak kunjung pudar.

Pada dasarnya potensi paling besar dari desa panti adalah lahan pertanian yang subur sehingga mayoritas warga desa panti ini berprofesi sebagai buruh tani. Tetapi dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan tidak sedikit warga yang mengalami kehilangan pekerjaan dan beralih profesi. Tetapi beberapa warga menjual lahannya dengan berbagai faktor dan pertimbangan diantaranya lahan pertanian yang terganggu saluran irigasinya yang

menyebabkan lahan tidak dapat berproduksi secara optimal.

Adanya pembangunan perumahan ini tentu dirasakan dampak negatif maupun dampak positifnya terutama dari segi ekonomi. Adapun dampak negatif yang di timbulkan dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan dari segi ekonomi antara lain :

1) Turunnya produksi pertanian. Dampak alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan ini menyebabkan produktivitas pangan akan menjadi berkurang dan menurun, seperti makanan beras, jagung, kentang, wortel, cabai, bawang, dan lain-lain. Adanya alih fungsi dan penyempitan lahan menyebabkan berkurangnya luas lahan sawah dan mengakibatkan turunnya produksi pertanian. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh oleh penulis hanya tersisa sebesar 53,6 hektar lahan sawah yang ada di Desa Panti.

2) Hilangnya kesempatan dan mata pencaharian petani. Dampak alih fungsi penyempitan lahan menjadi permukiman penduduk dan perumahan ini menyebabkan hilangnya kesempatan dan mata pencaharian petani. Hilangnya kesempatan petani menggarap lahannya secara berkelanjutan dan tidak mendapatkan manfaat dari hasil pertaniannya yang berguna untuk mencukupi pangan baik untuk diri sendiri maupun keluarga maupun diperjualbelikan. Serta hilangnya mata pencaharian para buruh tani secara permanen yang tidak dapat mengelola hasil jual lahannya kepada developer dengan baik. Warga desa Panti yang terdampak kehilangan pekerjaannya, beralih profesi menjadi pekerja serabutan dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya.

Terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang dikarenakan adanya migrasi dan urbanisasi. Dampak alih fungsi penyempitan lahan menjadi permukiman penduduk dan perumahan ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang dikarenakan adanya migrasi dan urbanisasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga desa panti yang terdampak dari alih fungsi dan penyempitan lahan mengalami peralihan profesi bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Dan juga banyaknya tingkat migrasi dan urbanisasi yang masuk ke desa panti sehingga membutuhkan tempat tinggal dan mengakibatkan semakin banyak alih. fungsi lahan untuk perumahan guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal para penduduk.

3) Pendapatan para petani yang berkurang. Dampak alih fungsi penyempitan lahan menjadi permukiman penduduk dan perumahan ini menyebabkan pendapatan para petani yang berkurang, Hal tersebut di buktikan dengan adanya pendapat dari salah satu kepala dusun yang terdampak dari alih fungsi dan penyempitan lahan ini Hasil dari bertani jauh lebih besar dari pada bekerja sebagai kuli bangunan maupun bekerja di pabrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pendapatan dari bertani jauh lebih besar dari pada pekerjaan sebagai kuli bangunan dan bekerja di pabrik. Hal itu menyebabkan penurunan pendapatan dari warga yang ada di Desa Panti yang terdampak dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan menjadi permukiman padat penduduk atau perumahan.

Adapun dampak positif yang di timbulkan dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan dari segi ekonomi antara lain :

1) Terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang kontruksi dan industri Dampak alih fungsi penyempitan lahan menjadi permukiman penduduk dan perumahan ini menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang kontruksi dan industri. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dengan beralih profesi dari buruh tani ke kuli bangunan maupun bekerja di pabrik serta berwirausaha.

2) Terbantunya UMKM warga Desa Panti. Dampak alih fungsi penyempitan lahan menjadi permukiman penduduk dan perumahan ini menyebabkan terbantunya UMKM warga Desa Panti.

Hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas jual beli antar warga yang terjadi dengan tujuan membantu perekonomian warga sekitar. Dan juga dengan adanya UMKM tersebut membantu membuka lapangan pekerjaan baru. Tidak hanya dengan profesi sebagai buruh tani, Tetapi pada dasarnya sangat dibutuhkan pembangunan dari pihak luar seperti pendirian pabrik air mineral bermerek “Ampo” untuk membantu memajukan perekonomian warga desa Panti dengan memberdayakan warga sekitar. Harapan perekonomian warga desa panti menurut wawancara yang diperoleh penulis dengan para informan dari Desa Panti , harapan dari warga desa panti terkait perekonomian warga adalah adanya pembangunan dari pihak luar dan masuknya suatu usaha yang mampu memberdayakan masyarakat Desa Panti untuk menjadi sebuah lapangan pekerjaan baru. Pembangunan tersebut diharapkan membantu memajukan perekonomian desa panti agar terdapat pembaruan bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya. Warga juga mengharapkan agar perekonomian Desa Panti dapat berkembang sehingga meminimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di desa tersebut.

3. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Segi Lingkungan

Pada dasarnya sebelum di banggunya perumahan yang ada di Dusun Krajan Selatan ini, Dusun tersebut berupa persawahan dan perkebunan. Keadaan tersebut disebabkan karena meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan peluang usaha lebih besar dari pada penggunaan lahan untuk sektor pertanian. Adanya alih fungsi dan penyempitan lahan ini menyebabkan beberapa dampak negatif yang berpengaruh terhadap lingkungan yang pastinya di rasakan oleh masyarakat sekitar terutama Desa Panti.

Adapun dampak negatif yang di timbulkan dari adanya alih fungsi dan penyempitan lahan dari segi lingkungan antara lain :

1) Hilangnya daerah resapan air. Dampak negatif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan terjadinya hilangnya daerah resapan air yang ada di sekitar Desa Panti. Hilangnya daerah resapan ini dapat menyebabkan terjadi banjir dan kekeringan. Terjadinya pengalihfungsian tersebut didukung juga oleh pembangunan infrastruktur yang mendorong suatu daerah untuk maju dan berkembang baik dalam sektor industri maupun jasa.

Terjadinya kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bersumber dari sampah warga perumahan dibuang secara sembarangan dan berserakan. Hal ini terjadi disebabkan karena belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan akhir atau (TPA) yang di sediakan oleh pihak developer.

2) Penambahan Lahan Tempat Tinggal. Dampak negatif dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk dan perumahan menyebabkan Penambahan Lahan yang digunakan untuk tempat tinggal. Penambahan lahan untuk tempat tinggal membuat kawasan Desa Panti terutama Dusun Krajan menjadi kumuh dan tidak beratur karena sampah yang dibuang secara sembarangan.

4. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Alih Fungsi Penyempitan Lahan Pertanian

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia. (Amil Amil et.al, 2019)

Di Desa Panti, adanya pengalihfungsian lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terlebih lagi pengalihan lahan tersebut terjadi dikawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengingat bahwa di sekitar kawasan tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis untuk di dirikan bangunan- bangunan toko, pabrik. Apabila hal

tersebut tidak diawasi dan di tindak dengan serius maka lahan pertanian yang tersisa sampai saat ini akan habis dialih fungsikan menjadi bangunan-bangunan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menghadapi alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian yang ada di Desa Panti, maka peran pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Desa Melakukan Sosialisasi dari Adanya Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian. Peran pemerintah desa dalam adanya alih fungsi penyempitan lahan pertanian ini adalah dengan melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada warga secara internal untuk tidak memberikan beberapa pertimbangan baik jangka pendek ataupun jangka panjang saat memberikan lahannya guna kepentingan pembangunan perumahan ataupun kepentingan suatu golongan tertentu. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah desa memikirkan jangka panjang dari warga yang memberikan lahan pertaniannya kepada pihak developer atau pembeli tanah yang mengakibatkan warga tersebut tidak memiliki lahan lagi sehingga mata pencahariannya hilang sebagai buruh tani. Adapun juga mempengaruhi sumber pangan mereka sehari-hari. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi.

2) Pemerintah menjadi regulator, dinamisator, dan fasilitator dari adanya pembangunan daerah. Peran pemerintah desa sebagai regulator dibutuhkan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penerbitan peraturan yang memuat pembatasan luas lahan yang digunakan sebagai alih fungsi lahan pertanian dan sisa lahan pertanian. Peran pemerintah sebagai dinamisator dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi kendala akibat dari alih fungsi dan penyempitan lahan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat. masyarakat merasa mendapatkan perhatian dan kepedulian dari perangkat desa itu sendiri.

Hal tersebut juga dapat disimpulkan sebagai fungsi dari pemerintah desa adalah menjembatani antara pihak developer dan warga yang akan memberikan lahannya untuk dialihfungsikan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Pemerintah sangat perlu memperhatikan berbagai pertimbangan dengan pasti yang memiliki tujuan guna mensejahterakan warga Desa Panti.

3) Pemerintah berperan sebagai pengawasan. Tahapan pengawasan yang dilakukan pemerintah disebut sebagai Observasi/pengamatan Observasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah desa melakukan pengamatan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian⁴. Pemerintah berperan sebagai penentu kebijakan. Faktor kebijakan dari pemerintah desa negara memang sangat dibutuhkan. Kendala dalam koordinasi kebijakan adalah, pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan. Industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan yakni adanya perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum termuat oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

4) Pemerintah memberikan bantuan BLT, BST dan PKH. Adanya bantuan berupa BLT dan PKH ini sangat membantu untuk warga desa Panti yang terdampak dari alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian ini. Pada dasarnya arti dari PKH adalah Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai. BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah sama-sama bantuan yang berupa uang tunai hanya saja sumber dananya yang berbeda. BST bersumber dari dana kementerian sosial dan BLT dari dana desa. (Desa Cibatu : BLT, BST, dan BPNT atau Non PKH, 2024)

5) Pemerintah desa memberikan bantuan berupa paket sembako. Peran pemerintah

desa dalam mengatasi turunnya produksi pangan akibat lahan yang dialihfungsikan dan terjadinya penyempitan adalah memberikan paket sembako berupa beras 10 kg kepada beberapa warga setiap dusun yang berjumlah 1179 warga yang benar-benar membutuhkan.

5. Izin Pendirian Perumahan

Pada dasarnya menurut informasi yang diperoleh dari pihak desa, terkait surat perizinan didirikannya suatu bangunan atau pembangunan perumahan ini diperoleh dari surat yang di berikan oleh kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN terkait lahan yang akan dipakai sebagai alih fungsi lahan pertanian, kemudian pemerintah desa bertugas untuk mempersiapkan lahan pertanian yang akan digunakan. Dalam hal ini, persyaratan dari alih fungsi lahan pertanian sementara ini yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa Panti adalah bukti kepemilikan lahan. Pemerintah Desa Panti belum memiliki peraturan yang mengatur terkait pembatasan luas lahan pertanian dan luas lahan yang di alihfungsikan.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab alih fungsi lahan yang dilakukan pada lingkungan Desa Panti, diantaranya : Faktor pembangunan sarana dan prasarana, faktor desakan pengembang, dan faktor tempat tinggal dan ekonomi. Dengan adanya alih fungsi lahan menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun dampak negatif dari segi fasilitas, segi ekonomi, dan segi lingkungan. Dampak positif dari segi fasilitas diantaranya tersedianya akses jalan yang mudah di lewati oleh warga desa Panti, Tersedianya arus listrik yang berguna untuk penerangan jalan, Sementara dampak negatif dari segi fasilitas adalah hilangnya investasi infrastruktur irigasi dan pengairan sawah akibat adanya pembangunan perumahan, Belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA). Sedangkan dampak positif dari segi ekonomi adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru dalam bidang konstruksi dan industri dan, terbantunya UMKM yang ada di masyarakat Desa Panti. Sedangkan dampak negatifnya adalah pendapatan para petani yang turun dan turunnya produksi pertanian, dan ketidakstabilan perekonomian karena adanya migrasi dan urbanisasi yang masuk ke Desa Panti. Ditinjau dari segi lingkungan, dampak negatif dari alih fungsi dan penyempitan lahan ini adalah hilangnya daerah resapan air, terjadinya kerusakan lingkungan dan penambahan lahan tempat tinggal.

Peran dari pemerintah desa panti dalam mengatasi alih fungsi dan penyempitan lahan pertanian ini adalah pemerintah melakukan Pemerintah Desa Melakukan Sosialisasi dari Adanya Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemerintah menjadi regulator, dinamisator, dan fasilitator dari adanya pembangunan daerah, Pemerintah desa berperan sebagai pengawasan, Pemerintah desa berperan sebagai penentu kebijakan, Pemerintah memberikan bantuan BLT, BST dan PKH, Pemerintah desa memberikan bantuan berupa paket sembako.

DAFTAR PUSTAKA

- Amil Amil, Lalu Hendra Maniza, Rio Wahyudi, “Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat, Vol 7 No 2, 2019” . (Diakses pada 31 Agustus 2024).
- Aniratul Hikmah, “Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 48-69, 2024”. (Diakses pada 6 September 2024)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan” , 2024: 1-21. (Diakses pada 31 Agustus 2024)
- Desa Cibatu : BLT, BST, dan BPNT atau Non PKH, 2024. (Diakses pada 31 Agustus 2024)
- Dwi Yuniarto, “ Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi”,2021. (Diakses Tanggal 14 Februari 2024).
- Febriana Sulistya Pratiwi, “ Data Pulau Terpadat Di Dunia, Jawa Bali Teratas”, 2023. (Diakses Tanggal 12 Februari 2024).
- Fahri Zulfikar, “10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?”, 2020. (Diakses Tanggal 31 Agustus 2024)
- Humbang Hasundutan, “Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia”, 2023. (Diakses Tanggal 14 Februari 2024)..
- I Nyoman Prabu Bulana Rumiarta, “Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat”, 2019. (Diakses Tanggal 15 Februari 2024).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah”, 2024 : 1-34(Diakses pada 31 Agustus 2024)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional”, 2023. (Diakses pada 31 Agustus 2024)
- Mardiya.(2019).Malthus.

<https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1088/covid-19-dalam-teori-malthus>. (Diakses Tanggal 13 Februari 2024).

Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *Humanika*, 21(1), 2021 : 33-54. (Diakses pada 31 Agustus 2024)

Ni Luh Budhi Arisini dan I Gede Surata, “Akibat Hukum dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Kecamatan Bulelang, Kabupaten Bulelang” *Ketha Widya*, Vol 8 No 1 , 2020 : 1-20 (Diakses pada 31 Agustus 2024)

Saldana., Miles & Huberman. “*Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publication*”. 2014. (Diakses pada 31 Agustus 2024)

Subair, S, “ Relevansi Teori Malthus Dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer. *Dialektika*, 9(2)”, 2019 (Diakses pada 31 Agustus 2024)

Rico Husen Permana, “Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar”, 2022 : 558. (Diakses pada 31 Agustus 2024)

Radix Prima, Siti Nur Hidayah, “Penelitian Kualitatif”, 2019 (Diakses pada 6 September 2024)

Universitas An Nur Lampung. .(2023).Kepadatan Penduduk : Pengertian, Faktor, Dampak dan Cara Mengatasinya.(2023). (Diakses Tanggal 15 Februari 2024).

Vina Ervinda Mardani. “Analisis Politik Hukum Agraria Dari Zaman Ke Zaman”, Vol 2 No.6, 2022.

Vivi Fatimah. “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Masalah”, 2023. (Diakses Tanggal 20 Februari 2024).

Yuari Susanti, Syafrudin, Muhammad Helmi, “Penggunaan Lahan Di Daerah Aliran Sungai Serayu Hulu Dengan Pengginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis”, Vol 13, No 1, 2020 :23-30 (Diakses pada 31 Agustus 2024)